

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Komunikasi Politik

Harold D. Lasswell mendefinisikan komunikasi politik sebagai siapa, mengatakan apa, di mana, kepada siapa, dan efek apa yang terbentuk (Pureklolon, 2016). Kemudian Tabroni (dalam Akib et al., 2023) menjelaskan komunikasi sebagai *“knowing what he wanted to communicate and knowing how he should deliver his message to give it the deepest penetration possible in to the minds of his audience”*. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa karakter komunikator selalu berusaha meraih keberhasilan semaksimal mungkin dalam menyampaikan pesan *“the deepest penetration possible”*. Artinya pengertian komunikasi bersumber dari gagasan komunikator yang ingin disampaikan pihak penerima dengan segala daya dan usaha, bahkan tipu daya agar pihak penerima mengena, memahami dan menerima lewat pesan-pesan yang disampaikan.

Menurut Budiarto (2008) politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses tujuan sistem politik dan proses pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut diperlakukan proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan yang menyangkut dengan

pendistribusian dari sumber-sumber yang ada.

Komunikasi politik dapat dijabarkan sebagai suatu bentuk penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk mencapai pengaruh tertentu di dalam suatu sistem politik. Dalam konteks ini, upaya komunikasi politik dilakukan dengan fokus pada pembahasan masalah yang mengikat seluruh warga masyarakat pada sanksi-sanksi yang telah ditetapkan bersama melalui lembaga politik (Cangara, 2020).

Rush dan Althoff (dalam Pureklolon, 2016) memberikan definisi yang menggambarkan komunikasi politik sebagai sebuah proses, di mana informasi politik yang relevan diidentifikasi dan disampaikan dari satu bagian sistem politik ke bagian lainnya, serta antara sistem sosial dengan sistem politik. Dengan kata lain, komunikasi politik menjadi sarana penting dalam mengalirkan informasi politik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Mueller (dalam Gantiano, 2018), komunikasi Politik didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik apabila menekankan pada hasil. Sedangkan definisi Komunikasi Politik jika menekankan pada fungsi komunikasi politik dalam sistem politik, adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya.

Menurut Haryanto & Rumar (dalam Mukarom, 2016) menjelaskan bahwa komunikasi politik adalah: “Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang bercirikan politik kepada khalayak politik, melalui media tertentu yang bertujuan memengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu kepentingan tertentu di masyarakat. Dengan demikian, inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis komunikasi tersebut dapat mengikat suatu kelompok atau warga tertentu”.

Definisi-definisi ini mencerminkan konsep komunikasi politik sebagai suatu sistem yang melibatkan pertukaran informasi, interaksi antarpelaku politik, dan pengaruh terhadap struktur pemerintahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik adalah suatu proses dimana pesan-pesan politik disampaikan dari pihak yang berkomunikasi kepada pihak penerima, dengan tujuan memengaruhi sikap, opini, atau perilaku penerima pesan.

2.1.1.1 Fungsi Komunikasi Politik

Menurut McNair (Cangara, 2016) komunikasi politik sebagai disiplin ilmu memiliki lima fungsi dasar yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi politik diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya.
2. Bagaimana mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta politik yang ada.

3. Bagaimana menyediakan institusi politik yang baik dengan platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat.
4. Bagaimana membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik.
5. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi dan penyeimbang. Media tersebut bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada masyarakat

2.1.1.2 Unsur-Unsur Komunikasi Politik

Menurut Hafied Cangara (2016) komunikasi politik sebagai body of knowledge juga terdiri atas berbagai unsur, yakni terdiri dari komunikator (penyampai pesan), *message* (pesan), komunikan (penerima pesan). Nimmo (dalam Syauket et al., 2024) dalam mengkaji komunikasi politik melibatkan unsur-unsur komunikator politik, pesan politik, media politik, khalayak politik, serta akibat-akibat komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan pembicaraan politik yang melibatkan unsur-unsur komunikasi dengan akibat-akibat politik tertentu. Adapun unsur-unsur komunikasi politik menurut Nimmo (Syauket et al., 2024) adalah:

1) Komunikator Politik

Komunikator politik tidak hanya menyangkut partai politik,

melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau komunikator politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi dengan hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik.

2) Pesan Politik

Pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun secara terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik.

3) Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik adalah merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh para pakar komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya misalnya media massa dan media elektronik. Dalam saluran komunikasi kelompok termasuk didalamnya partai politik, organisasi profesi, ikatan alumni, organisasi sosial keagamaan, karang taruna sedangkan saluran komunikasi publik termasuk didalamnya aula, balai desa, pameran, sekolah, kampus, panggung kesenian, saluran komunikasi sosial termasuk didalamnya pesta perkawinan, pertunjukan wayang, pesta rakyat, acara sunatan, pesta tani.

4) Sasaran atau Target Politik

Sasaran atau Target Politik adalah anggota masyarakat yang

diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan dan lain-lain.

5) Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, di mana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Pemberian suara ini sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai tingkat presiden, Anggota DPR, Gubernur, Anggota DPRD, Bupati.

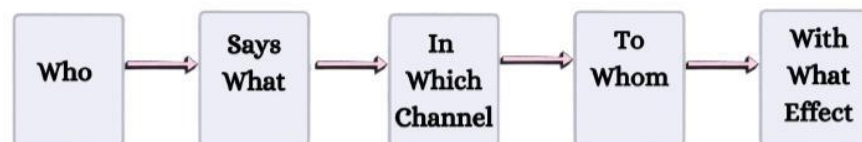
2.1.1.3 Model-Model Komunikasi Politik

Model komunikasi politik adalah cara untuk memahami bagaimana pesan politik dikirimkan, diterima, dan diproses oleh masyarakat. Terdapat beberapa model komunikasi politik yang telah diusulkan oleh para ahli komunikasi politik. Berikut adalah penjelasan singkat tentang model komunikasi politik yang paling umum:

1. Model "One-Way" (Siaran)

Harold D. Lasswell (dalam Poernomo Irwanti., 2023), model ini menggambarkan komunikasi politik sebagai suatu proses yang bersifat satu arah, dimana pesan politik dikirimkan dari sumber ke penerima tanpa adanya umpan balik dari penerima. Model ini

didasarkan pada teori penerima-pesan-pengirim dan teori pengaruh sosial. Salah satu contohnya adalah kampanye iklan politik yang biasanya ditayangkan di televisi, radio, atau media cetak.



Sumber: Pengolahan penulis dari (Pureklolon, 2016)

Gambar 2. 1 Model Komunikasi Politik Harold D. Lasswell

2. Model Aristoteles

Merupakan model ketiga elemen ini menggambarkan sebagai landasan komunikasi persuasif, yang masing-masing memiliki tujuan tersendiri:

a. Etos

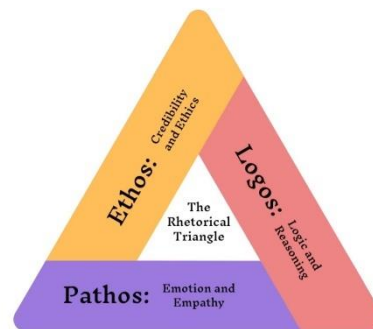
Membangun kredibilitas dan kepercayaan. Etos menyentuh nilai-nilai etika atau moral audiens dan membangun kredibilitas pembicara/penulis.

b. Patos

Menciptakan hubungan emosional. Pathos menyentuh emosi audiens, memanfaatkan perasaan untuk membujuk.

c. Logos

Menggunakan argumentasi logis dan fakta. Logos mengandalkan penalaran dan bukti untuk meyakinkan audiens.



Sumber: dikutip penulis dari Abell (2024).

Gambar 2. 2 Model Komunikasi Politik Aristoteles

3. Model "Two-Way" (Dialog)

Wilbur Schramm (dalam Poernomo Irwanti., 2023), model ini menggambarkan komunikasi politik sebagai suatu proses dialog atau interaksi yang melibatkan pengirim dan penerima. Dalam model ini, penerima tidak hanya menerima pesan politik, tetapi juga memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap pesan tersebut. Model ini didasarkan pada teori komunikasi interpersonal dan teori pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah debat politik atau pertemuan dengan warga dalam rangka kampanye.

2.1.2 Pemilihan Umum Legislatif

Merujuk pada Undang-Undang N0. 7 tahun 2017, pemilihan umum legislatif, atau sering disebut pemilu legislatif, adalah proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu legislatif merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan hak-hak politiknya, sekaligus mekanisme untuk memastikan keterwakilan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan (KPU, 2023).

Pemilu legislatif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi karena melalui proses ini, perwakilan publik yang dipercaya untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dipilih langsung oleh masyarakat. Fungsi utama legislatif adalah menyusun dan mengesahkan undang-undang, menetapkan anggaran negara, dan memantau operasional pemerintahan agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku (Tajudin, 2024).

Landasan hukum pelaksanaan Pemilu Legislatif di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, yang mencakup aturan mengenai tahapan pemilu, persyaratan peserta pemilu, tata cara kampanye, hingga mekanisme pemungutan dan penghitungan suara. Undang-undang ini juga memberikan dasar bagi peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.

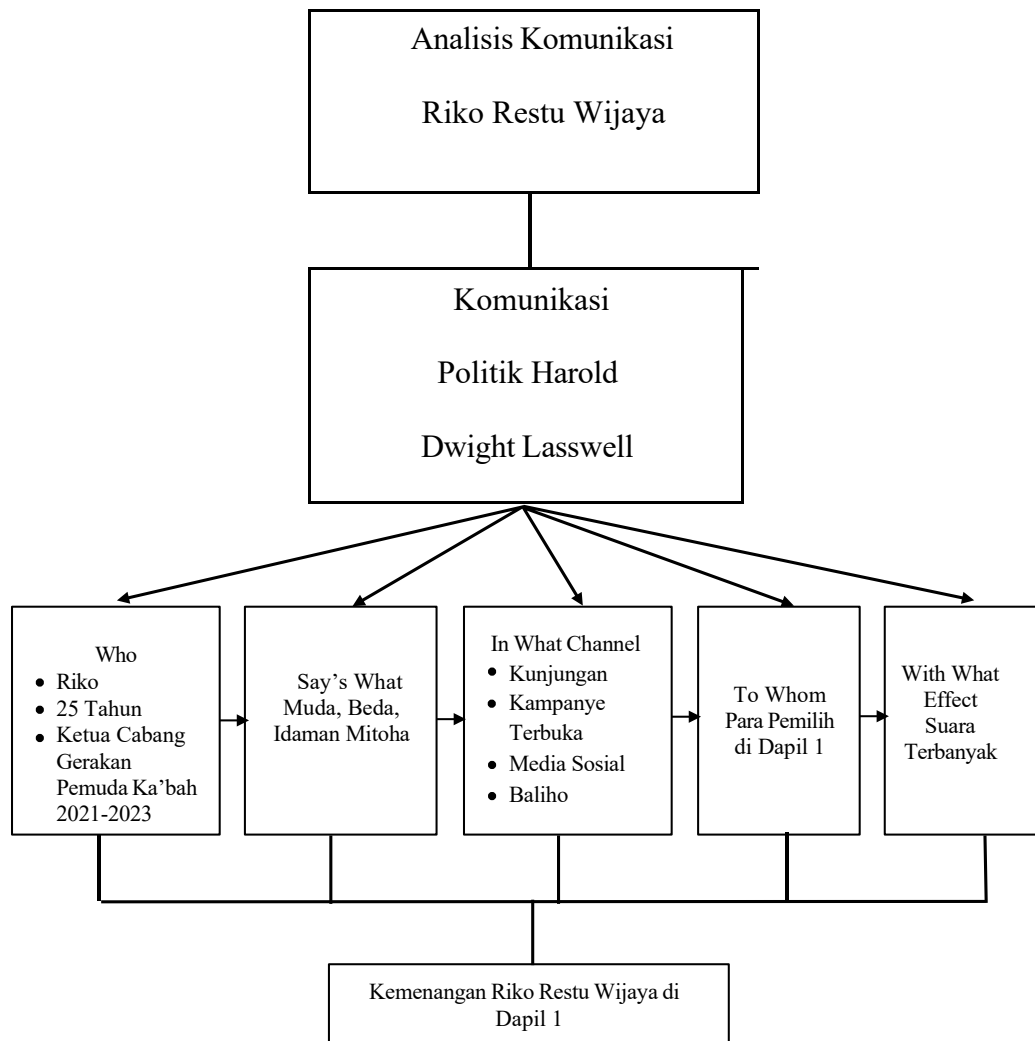
Pemilu Legislatif tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi partai politik dan calon legislatif, tetapi juga mencerminkan tingkat kedewasaan

politik masyarakat. Keberhasilan pemilu bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, transparansi penyelenggaraan, serta integritas para calon dan penyelenggara pemilu.

Dengan adanya Pemilu Legislatif, rakyat memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili oleh individu-individu yang kompeten dan memiliki komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemilu ini juga memperkuat sistem *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian menggambarkan alur pemikiran peneliti mengenai fokus dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi politik yang dilakukan Riko Restu Wijaya dalam memperoleh suara pada pemilihan calon legislatif Kota Tasikmalaya Tahun 2024. Dalam rangka menarik perhatian masyarakat dan memperoleh suara sehingga memenangkan pemilihan umum, setiap calon memiliki pola komunikasi politik yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dari masyarakat.



Gambar 2. 3 Kerangka pemikiran

(Sumber: Pengolahan penulis)

Keterangan:

Riko Restu Wijaya merupakan anak dari ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan yaitu H. Jani Wijaya. Riko Restu Wijaya juga merupakan pendatang baru pada pemilihan umum legislatif 2024. Selain pendatang, beliau juga berasal dari kalangan pemuda, dalam kontestasi

pemilihan umum legislatif, komunikasi politik yang digunakan Riko Restu Wijaya tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat keyakinan para pemilih untuk memberikan suaranya. Karena dalam komunikasi politik menjelaskan perihal proses penyampaian pesan yang efektif dilakukan oleh Riko Restu Wijaya dalam memenangkan pertarungan politik. Bahkan dalam hal ini, Riko Restu Wijaya mendapatkan perolehan suara sebanyak 7.250 suara.

Besaran perolehan suara yang didapatkan oleh Riko Restu Wijaya, lebih besar dibandingkan dengan petahana separtainya. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana komunikasi politik Riko Restu Wijaya dalam meyakinkan para pemilih.